



Analisis kinerja keuangan pemerintah wilayah Kota Cirebon (anggaran tahun 2015-2019)

Evi Lutfiyana¹, Agus Munandar²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

¹evilutfiyana91@gmail.com, ²agus.munandar@esaunggul.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 19 Maret 2022

Disetujui 23 Maret 2022

Diterbitkan 25 Maret 2022

Kata kunci:

Kinerja keuangan daerah;
Analisa rasio; laporan
keuangan

Keywords :

Regional performance;
analysis;
statements

financial Ratio
Financial

ABSTRAK

Dalam riset ini bertujuan untuk mengenali Kinerja Keuangan Pemerintah wilayah Kota Cirebon (Anggaran Tahun 2015-2019). Metode riset ini memakai deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat pengkajian seperti derajat rasio desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektifitas, serta rasio Pertumbuhan. Dari hasil riset ini membuktikan kalau kemampuan finansial pemerintah wilayah Kota Cirebon diamati dari Rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa Penghasilan rata-rata Kota Cirebon dari 5 tahun terakhir (2015-2019) sebanyak 31.16%. Tingkat kemandirian Kota Cirebon berada paling rendah pada tahun 2015 dengan persentase 32.84 %, sedangkan pada tahun 2018-2019 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Cirebon mengalami peningkatan berada dikategori sedang dan mempunyai hubungan partisipatif. Perihal itu kalau Pemerintah Wilayah Kota Cirebon bisa dibilang mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam mewujudkan PAD yang sudah direncanakan serta pertumbuhan PAD Kota Cirebon relatif naik turun. Akan tetapi, hal tersebut buat senantiasa memaksimalkan pendapatan dari kemampuan pemasukan yang sudah ada untuk kepentingan wilayah dan warganya.

ABSTRACT

This study aims to determine the Financial Performance of the Regional Government of Cirebon City (2015-2019 Budget). This research method uses quantitative descriptive using assessment tools such as the degree of decentralization ratio, independence ratio, effectiveness and growth ratio. Based on the results of the studies are it shows that the financial performance of the local government of Cirebon City is seen from the decentralization ratio has increased from year to year, although the percentage increase is not so large. This shows that the average income of the city of Cirebon from the last 5 years (2015-2019) is 31.16%. Meanwhile, in the 2015 local government of Cirebon City had been financial of independence ratio was lowest situation with a percentage of 32.84, but in the 2018-2019 the ratio of Cirebon City's regional financial independence has increased, being in the medium category and has a participatory relationship. In this regard, the Cirebon City Regional Government can be said to have an ability financial to realize the planned PAD also Cirebon City's PAD growth is relatively up and down. but it that, to always maximize revenue from the existing income capabilities for the benefit of the region and its citizens.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Semenjak pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus kekayaan daerahnya yang biasa kita sebut dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Maka, hal tersebut membuka peluang untuk pemerintah daerah buat menata serta mengembangkan tiap-tiap daerahnya. Sehingga, pemerintah wilayah bisa tidak bergantung pada penguasa pusat serta lebih mandiri. Sedangkan, menurut Pemandagri No. 21 (2019), pengurusan finansial wilayah merupakan totalitas aktivitas yang mencakup pemograman, penerapan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan serta penatausahaan. Dengan terdapatnya pengurusan finansial daerah maka warga sekitar bisa mengenali gimana finansial wilayah yang sudah dianggarkan dalam APBD tersebut.

Sedangkan Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja

pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyaul Ulum, 2009).

Menurut Mahsun, Firma dan Heribertus (2011), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi finansial (PSAK) 1 (2009) mengenai penyajian informasi finansial menerangkan bahwa informasi finansial merupakan sesuatu penyajian yang tertata dari posisi finansial serta kemampuan finansial dalam sebuah entitas. Dari pengertian itu bisa disimpulkan kalau informasi finansial ialah data mengenai situasi finansial yang berhubungan dengan posisi serta kemampuan finansial. Data posisi finansial tersebut bisa mencakup kewajiban, ekuitas entitas serta peninggalan (aset), sedangkan kemampuan finansial mencakup pemasukan serta bobot (beban), tercantum pula profit serta defisit (losses) yang mencuat di luar aktivitas utama entitas, partisipasi dari owner serta distribusinya.

Laporan keuangan ialah informasi yang bermuatan data finansial dalam suatu badan atau organisasi. Informasi finansial umumnya diterbitkan oleh industri, yang merupakan hasil dari proses akuntansi untuk alat menginformasikan laporan finansial baik pada internal maupun eksternal. Menurut Standar akuntansi keuangan (SAK) bahwa informasi finansial merupakan bagian dari cara peliputan finansial yang komplit umumnya mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan pergantian posisi finansial yang bisa dipaparkan dalam berbagai cara, misalnya: sebagai informasi arus kas atau informasi arus dana, catatan serta informasi lain dan modul uraian yang ialah bagian integral dari informasi finansial. Tidak hanya itu, termasuk agenda serta tambahan informasi yang berhubungan dengan informasi itu.

Pemendagri Nomor 13 (2006) mengatakan kalau "kinerja ialah hasil dari aktivitas yang hendak ataupun yang sudah sudah digapai sehubungan dengan pemakaian perhitungan dengan jumlah serta mutu yang terukur". Adapun wujud dari pengukuiran kinerja itu ialah perbandingan finansial yang tercipta dari faktor informasi pertanggungjawaban pada kepala wilayah berbentuk kalkulasi APBD (Indonesia, 2006).

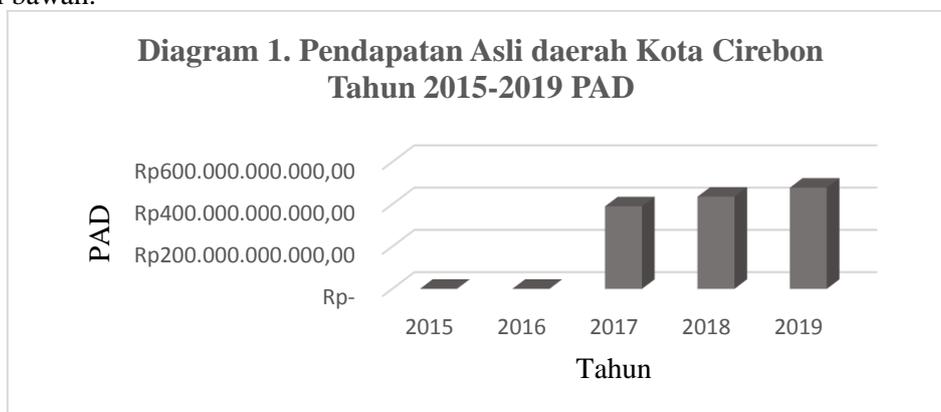
Salah satu pusat penghasilan asli wilayah yang bisa dibesarkan merupakan retribusi (pungutan) wilayah. Pungutan wilayah ialah salah satu pusat penghasilan asli wilayah yang berarti untuk mendanai penerapan pemerintah wilayah setempat. Sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009) mengenai pungutan wilayah serta Pajak wilayah, yang mengatakan bahwa pungutan wilayah serta pajak wilayah yaitu salah satu sumber penghasilan wialyah yang berarti untuk mendanai penerapan rezim wilayah.

Kota Cirebon ialah salah satu kota yang mempunyai kemampuan mendapatkan Penghasilan Asli wilayah yang besar, sebab Kota Cirebon mempunyai banyak objek darmawisata. Tiap akhir minggu banyak warga yang dari luar kota seperti kabupaten atau kota yang bersebelahan dengan Kota Cirebon seperti warga Ciayumajakuning mengunjungi ke Kota Cirebon untuk berekreasi dengan keluarganya.

Kota Cirebon memiliki kemampuan yang amat besar dalam menggapai sasaran penghasilan wilayah, dimana pembangunan tempat darmawisata amat cepat dibangun di Kota Cirebon ditambah telah bertambahnya akses mengarah Kota Cirebon salah satunya ialah Jalur TOL Cipali (Cikopo – Palimanan). Pemerintah wilayah Kota Cirebon dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan pengaturan pemanfaatan ruang yang bermutu, membuat Kota Cirebon jadi opsi bagi para turis buat liburan di Kota Cirebon, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah wilayah Kota Cirebon membuat Kota Cirebon jadi salah satu kota tujuan liburan bagi warga Indramayu, Majalengka, Cirebon

dan Kuningan (Ciyumajakuning). Tingginya jumlah turis dalam negeri maupun luar negeri ke Kota Cirebon pastinya menimbulkan jumlah alat transportasi bertambah serta melonjaknya kemacetan di wilayah ini.

Adapun rangkuman pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon tahun 2015-2019, seperti diagram di bawah:



Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)

Diagram 1 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Cirebon, tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan berarti Kota Cirebon mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat sepenuhnya.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli antaralain Pramono (2014) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 sudah efektif, efisien, mengalami pertumbuhan positif serta memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman. Namun demikian, tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surakarta masih rendah karena pendapatan daerah yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Mariani (2013) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah efisien walaupun mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran daerah, tetapi tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat. Sedangkan Azhar (2008) memperoleh hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Nanggro Aceh Darussalam sebelum dan sesudah otonomi mengalami penurunan atau mengarah ke arah yang lebih buruk.

Sesuai penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam riset ini ialah sebagai berikut: “Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Kota Cirebon (Anggaran Tahun 2015-2019) dengan memakai analisis rasio derajat desentralisasi, rasio independensi (kemandirian), rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan”. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tujuan dari riset ini ialah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Kota Cirebon (Anggaran Tahun 2015-2019) dengan memakai analisa rasio derajat desentralisasi, rasio independensi (kemandirian), rasio efektifitas serta rasio pertumbuhan”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam riset ini, penulis memakai riset kuantitatif deskriptif. Dimana riset kuantitatif deskriptif ialah riset yang berupa nilai serta dicoba buat mengenali nilai variabel baik satu variabel atau lebih tanpa menyamakan atau mengaitkan antara variabel satu dengan variabel yang lain maksudnya dalam penerapan metode-metode deskriptif tidak terbatas cuma pada pengumpulan informasi, namun mencakup menganalisa serta pemahaman mengenai arti informasi tersebut.

Jenis Sumber Data

Sumber data ialah seluruh sesuatu yang bisa membagikan data terkait riset. Biasanya, informasi yang dipakai dalam riset ini memakai satu jenis sumber data, yaitu data sekunder. Adapu, data tersebut didapat dari sebuah lembaga kepengurusan finansial serta aset daerah (BPKAD) pemerintah kota

Cirebon dan literatur-literatur kepustakaan misalnya dari buku-buku ataupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan teori-teori dalam riset ini. Data sekunder ialah pusat informasi yang tidak langsung membagikan data kepada pengumpul informasi, misalnya informasi atau data lewat orang lain atau dari dokumen-dokumen yang telah terdapat dalam informasi finansial pemerintah wilayah tersebut (Sugiyono, 2007). Data sekunder yang dipakai dalam riset ini yaitu kemampuan informasi finansial Pemerintah Wilayah Kota Cirebon Anggaran Tahun 2015-2019.

Metode Analisis Data

Analisis data ialah cara memproses data yang sudah terkumpul kemudian bisa memberikan interpretasi. Hal tersebut didukung oleh (Moleong, 2017). Dengan demikian, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara umum terlihat dari realisasi penghasilan dan anggarannya. Pemerintah daerah dikatakan mempunyai kemampuan penghasilan yang bagus jika sanggup mendapatkan penghasilan yang melampaui jumlah yang dianggarkan. Instrumen yang dipakai dalam mengukur analisis data ialah derajat rasio desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektifitas, serta rasio Pertumbuhan. Analisis Kemampuan Finansial Pemerintah Daerah dalam Pengurusan Anggaran Penghasilan Daerah diantaranya:

Derajat Rasio Desentralisasi

Pengukuran derajat desentralisasi menggunakan formula seperti berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 3.1 Evaluasi Tingkatan Desentralisasi

Derajat Desentralisasi (%)	Tingkatan Desentralisasi
>50%	Sangat Baik
40,1% - 50%	Baik
30,1% - 40%	Cukup
20,1% - 30%	Sedang
10,1% - 20%	Kurang
0% - 10%	Sangat Kurang

Sumber: R. Agoes kamaroellah, Analisis tingkat kemampuan keuangan daerah, (2017)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) formulasinya yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Rasio Kemandirian Daerah & Pola Hubungan

Keahlian finansial	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: Mahsum, (2019) dalam Dwi Jayanti dan Ruserlistyanti, (2013)

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD mendeskripsikan kesanggupan pemerintah daerah dalam mewujudkan PAD yang direncanakan serta dibandingkan dengan sasaran yang diresmikan sesuai pada kemampuan riil daerah. Ketika Rasio Efektivitas PAD makin besar, maka kinerja pemerintahan daerah makin baik. Metode yang dipakai buat membagi Rasio Efektivitas PAD ialah:

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 3.3 Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas	Kriteria Evaluasi
< 60%	Tidak efektif
60 – 80%	Kurang efektif
80 – 90%	Cukup efektif
90 – 100%	Efektif
> 100%	Sangat efektif

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan, pendapatan dan belanja daerah menggunakan formula dibawah ini:

$$r = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1}, \text{dimana:}$$

r = Rasio Pertumbuhan

PAD Tahun t = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasional yang digunakan pada tahun ke-n

PAD Tahun t-1= Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasional yang digunakan pada tahun ke-0 (tahun sebelumnya n).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Cirebon

Kota Cirebon ialah kota yang terdapat di Jawa Barat pantai tepi laut utara pulau jawa atau jalur pantura. Jarak kota Cirebon ini bisa ditempuh melalui transportasi sepanjang 258 km dari kota Jakarta serta 130 km dari kota Bandung dan paling timur berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Letak Cirebon yang sangat strategis menjadikan kota ini sebagai pusat dermaga pada era dulu alhasil kota ini banyak didatangi oleh para pendatang dari belahan dunia, misalnya Arab, Tiongkok, India dan Eropa. Di samping itu, kota Cirebon merupakan kota Sejarah dan budaya sehingga mendapatkan sebutan “Kota Waliyullah” karena ada salah satu wali yang sangat berjasa di kota ini yaitu Sunan Gunung Jati. Adapun perbatasan Kota Cirebon yaitu Sisi Barat: Kabupaten Cirebon, Sisi Timur: Laut jawa, Sisi Selatan:Sungai Kalijaga dan Sisi utara: Bengawan Kedung Pane.

Gambaran Umum PDRB Kota Cirebon

PDRB ialah salah satu indikator penting dalam perkembangan ekonomi di suatu area tertentu serta dalam rentang waktu tertentu (1 tahun) yang diperoleh oleh semua aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah atau dalam suatu negara. Terdapat 2 metode dalam penyajian PDRB diantaranya atas dasar harga konstan serta atas dasar harga berlaku. Berikut data PDRB Kota Cirebon Tahun 2015-2019:

Table 4. 1 PDRB Kota Cirebon Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) serta Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (Juta Rupiah), 2015–2019

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
1	2015	16.703.880,15	13.269.243,42
2	2016	18.139.081,42	14.077.046,46
3	2017	19.821.298,75	14.893.138,76
4	2018	21.634.236,70	15.817.650,01
5	2019	23.456.830,11	16.812.908,00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon (2019)

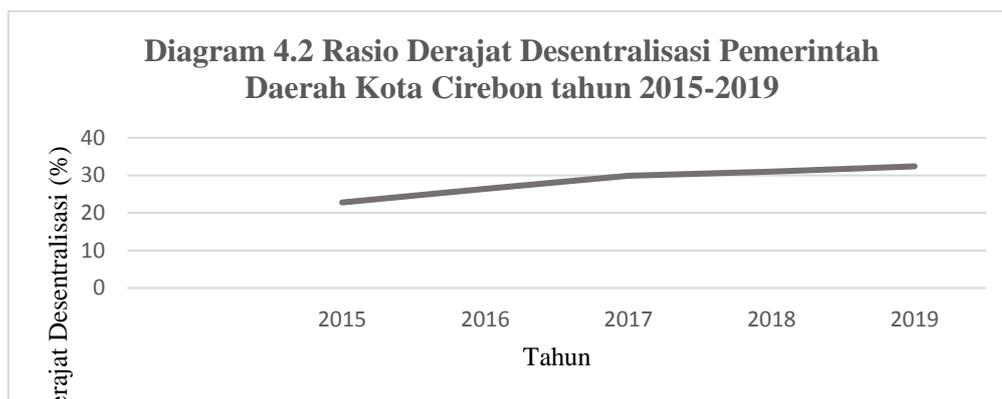
Tahun yang dipakai untuk patokan perhitungan adalah tahun 2014. Kemajuan PDRB Kota Cirebon pada tahun 2015-2019. Dimana dari tabel 4.1 bahwa Nilai PDRB Kota Cirebon sesuai ADHB sejak tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami trend yang meningkat. Pada tahun 2015 PDRB terdaftar sebanyak 16.703.880,15 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 23.456.830,11 juta rupiah. Ekskalasi PDRB yang lumayan besar dipengaruhi oleh aspek inflasi. Secara riil PDRB Kota Cirebon juga terus meningkat di kurun waktu 2015—2019, tercatat

13.269.243,42 juta rupiah pada 2015 kemudian nilainya terus meningkat hingga mencapai 16.812.908,00 juta rupiah di 2019.

Tabel 4.2 Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Tahun	PAD (Dalam Rp)	TPD (Dalam Rp)	DD (%)	Kriteria
2015	319.893.842,20	1.403.866.685,44	22.79	Sedang
2016	363.115.250,98	1.373.622.325,42	26.43	Sedang
2017	390.325.627.300	1.304.838.779.300	29.91	Sedang
2018	435.840.216.000	1.404.746.324.000	31.03	Cukup
2019	478.465.076.450	1.476.600.611.450	32.40	Cukup

Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)



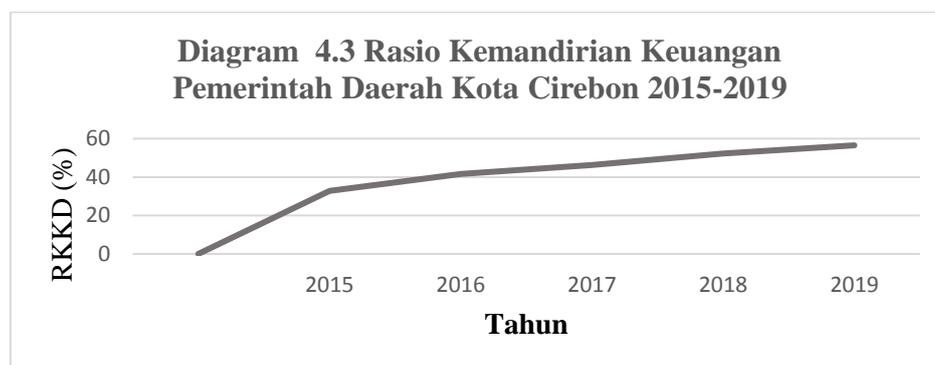
Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)

Berdasarkan uraian dari perhitungan tabel diatas bahwa rasio derajat desentralisasi dari tahun 2015-2019 pada pemerintahan Kota Cirebon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun kenaikan persentasenya tidak begitu besar. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan rata-rata Kota Cirebon dari 5 tahun terakhir (2015-2019) sebanyak 31.16% artinya tingkat kemampuan keuangan pendapatan asli daerah sudah terpenuhi karena berada di level “Cukup”.

Tabel 4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon 2015-2019

Tahun	Aktualisasi PAD (Rp)	Pendapatan transmisi (Rp)	Pola Hubungan	RKKD (%)
2015	319.893.842,20	973.971.235,020	Konsultatif	32.84
2016	363.115.250,98	870.837.793.61	Konsultatif	41.70
2017	390.325.627.300	842.093.152.000	Konsultatif	46.35
2018	435.840.216.000	834.026.488.000	Partisipatif	52.26
2019	478.465.076.450	846.451.794.000	Partisipatif	56.53

Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)



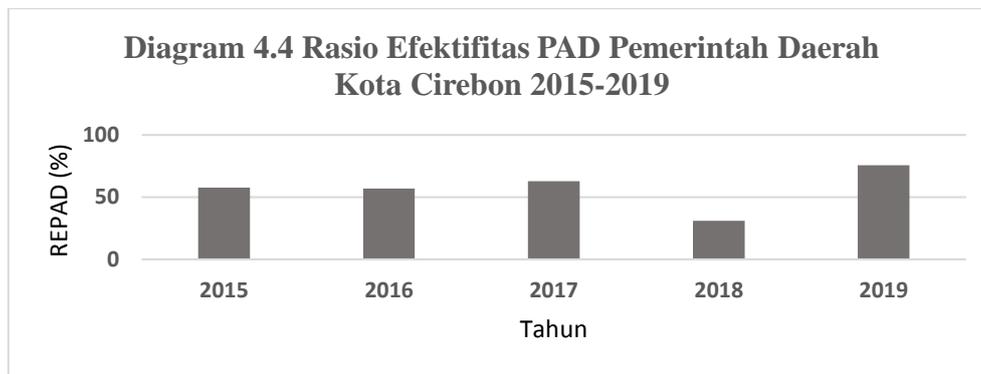
Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)

Dari Uraian tabel diatas bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Cirebon pada tahun 2015 berada di situasi paling rendah dengan persentase 32.84 dan memiliki pola hubungan konsultatif. Sedangkan pada tahun 2018-2019 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Cirebon mengalami peningkatan berada dikategori sedang dan mempunyai hubungan partisipatif.

Tabel 4.4 Rasio Efektifitas PAD Pemerintah Daerah Kota Cirebon 2015-2019

Tahun	Taksiran PAD (Rp)	Aktualisasi PAD (Rp)	Kriteria	REPAD (%)
2015	184.221.830,43	319.893.842,20	Tidak efektif	57.59
2016	206.764.251,70	363.115.250,98	Tidak efektif	56.94
2017	245.276.282.000	390.325.627.300	Kurang efektif	62.88
2018	134.879.620.000	435.840.216.000	Tidak efektif	30.95
2019	361.581.631.000	478.465.076.450	Kurang efektif	75.57

Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)



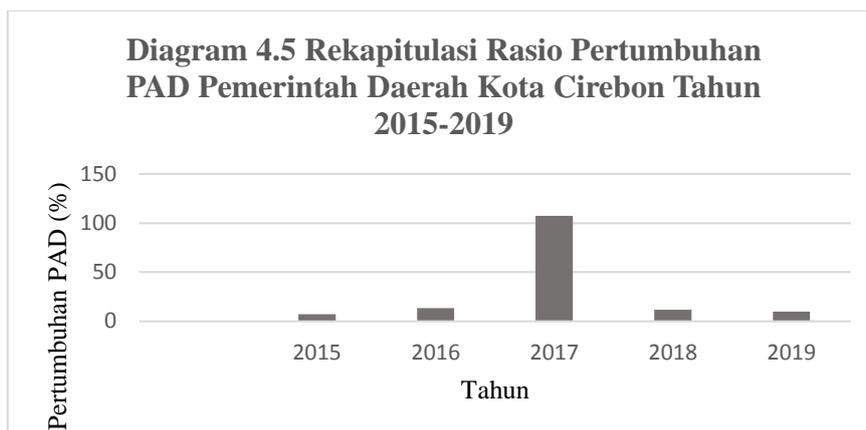
Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas PAD pemerintah daerah Kota Cirebon 2015, 2016 & 2018 “tidak efektif” karena nilai persentase yang diperoleh kurang dari 60%. Sedangkan pada tahun 2017 & 2019 rasio efektifitas PAD Kota Cirebon “Tidak efektif” karena kriteria presentase berada di kategori 60-80%. Perihal itu kalau penguasa Kota Cirebon bisa dibidang mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam perihal mewujudkan PAD yang sudah direncanakan, tetapi buat senantiasa memaksimalkan pendapatan dari kemampuan pemasukan yang sudah ada.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD t (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD t-1	Rasio Pertumbuhan PAD (%)
2015	319.893.842,20	298.540.660,32	7.15
2016	363.115.250,98	319.893.842,20	13.51
2017	390.325.627.300	363.115.250,98	107.39
2018	435.840.216.000	390.325.627.300	11.66
2019	478.465.076.450	435.840.216.000	9.78

Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)



Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)

Tabel 4.6 Rekapitulasi Rasio Pertumbuhan Penghasilan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2015-2019

Tahun	Aktualisasi Penghasilan t (Rp)	Aktualisasi Penghasilan t-1 (Rp)	Rasio Pertumbuhan Penghasilan (%)
2015	1.403.866.685,44	1.234.067.584,54	13.76
2016	1.373.622.325,42	1.403.866.685,44	(2.15)
2017	1.304.838.779.300	1.373.622.325,42	94.89
2018	1.404.746.324.000	1.304.838.779.300	7.66
2019	1.476.600.611.450	1.404.746.324.000	5.12

Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)



Sumber: BKD Cirebon Kota dan Jabar BPS (diolah penulis)

Hasil analisis rasio pertumbuhan PAD Kota Cirebon 2015-2019 bahwa pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan rasio tertinggi dengan presentasi 107.39 % sedangkan rasio pertumbuhan Pendapatan Kota Cirebon 2015-2019 pada tahun 2016 mengalami penurunan (minus) dengan persentase (2.15) % artinya kondisi keuangan Kota Cirebon sedang mengalami defisit. Akan tetapi, ketika tahun 2017 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan yaitu dengan persentase 94.89 %.

KESIMPULAN

Dari hasil Analisa kinerja keuangan menggunakan Analisa rasio bahwa pemerintah daerah Kota Cirebon memiliki kondisi kinerja keuangan sebagai berikut: 1) Dilihat dari rasio desentralisasi tahun 2015-2019 pada pemerintahan Kota Cirebon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun kenaikan persentasenya tidak begitu besar. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan rata-rata Kota Cirebon dari 5 tahun terakhir (2015-2019) sebanyak 31.16% artinya tingkat kemampuan keuangan pendapatan asli daerah sudah terpenuhi karena berada di level "Cukup"; 2) rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Cirebon pada tahun 2015 berada di situasi paling rendah dengan presentase 32.84 dan memiliki pola hubungan konsultatif. Sedangkan pada tahun 2018-2019 rasio kemandirian

keuangan daerah Kota Cirebon mengalami peningkatan berada dikategori sedang dan mempunyai hubungan partisipatif ; 3) Hasil analisis rasio pertumbuhan PAD Kota Cirebon 2015-2019 bahwa pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan rasio tertinggi dengan persentase 107.39 % sedangkan rasio pertumbuhan Pendapatan Kota Cirebon 2015-2019 pada tahun 2016 mengalami penurunan (minus) dengan persentase (2.15) % artinya kondisi keuangan Kota Cirebon sedang mengalami defisit. Akan tetapi, Ketika tahun 2017 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan yaitu dengan persentase 94.89 %; 4) rasio efektifitas PAD pemerintah daerah Kota Cirebon 2015, 2016 & 2018 “tidak efektif” karena nilai persentase yang diperoleh kurang dari 60%. Sedangkan pada tahun 2017 & 2019 rasio efektifitas PAD Kota Cirebon “Tidak efektif” karena kriteria presentase berada di kategori 60-80%. Perihal itu kalau penguasa Kota Cirebon bisa dibilang mempunyai kemampuan yang kurang bagus dalam perihal mewujudkan PAD yang sudah direncanakan, tetapi buat senantiasa memaksimalkan pendapatan dari kemampuan pemasukan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M. K. S. (2008). *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah*.
- BPKAD Kota Cirebon. (2019). *Laporan realisasi anggaran Kota Cirebon*.
- Ihyaul Ulum, M. D. (2009). *Audit sektor publik suatu pengantar*. PT. Bumi Aksara.
- Indonesia, R. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah. *Negara Republik Indonesia*.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123–138.
- Mahsun, M. (2019). Konsep dasar penganggaran. *Penganggaran Sektor Publik*, 256.
- Mahsun, Mohamad, Firma, S., & Andre, P. H. (2011). Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. *BPFE: Yogyakarta*.
- Mariani, L. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21. (2019). *Pengelolaan keuangan daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13. (2006). *Pedoman pengelolaan keuangan daerah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Finansial (PSAK). (2009). *Penyajian informasi finansial*.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- R. Rusherlistiyanti., D. (2013). Analisis analogi kemampuan finansial pemerintah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12.
- Sugiyono, D. (2007). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. (2009). 123(10), 2176–2181.